



Policy Making Model in Flood Disaster Management in West Aceh

Yeni Sri Lestari, Irma Juraida, Dara Quthni Effida

Universitas Teuku Umar, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: March 14, 2021
Revised: July 20, 2021
Accepted: September 25, 2021
Available online: September 30, 2021

KEYWORDS

Policy, Model, Countermeasure, Disaster

CORRESPONDENCE

Phone: +6282365328710
E-mail: yenisrilestari@utu.ac.id

A B S T R A C T

This article examines various government policy issues that often intersect with the interests of many people, even though policy is the main foundation in upholding integration between government, society and welfare. The various policy processes that exist indicate that each policy must be formulated appropriately to create synergy between inputs and outputs. This also applies to flood prevention in West Aceh. Therefore, this study will examine how the existing policy models in West Aceh in dealing with floods? And how is the effectiveness of the policy in overcoming the flood disaster in West Aceh? This study is described using a qualitative descriptive approach and literature study as the research method of this study. Some policies in West Aceh consist of policies made using the rational model and also the incremental model. In addition, the study found that the policy model for dealing with floods in Aceh Barat has not had a positive impact on the annual flood mitigation that always occurs.

PENDAHULUAN

Aceh Barat sebagai wilayah yang memiliki jumlah penduduk yang harus mampu diatur oleh pemerintah dengan menjalankan berbagai macam kebijakan yang bertujuan menciptakan keselarasan antar masyarakat dalam lingkup yang besar, termasuk di dalamnya mengenai kebijakan dalam menanggulangi banjir tahunan di Aceh Barat. Kebijakan harus mampu menjadi pondasi bagi tegaknya sistem pemerintahan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Aceh barat, sehingga kebijakan yang baik adalah kebijakan yang selaras dengan kedaulatan rakyat banyak.

Fakta kebijakan yang ada saat ini di Aceh Barat seringkali menimbulkan pertentangan dan ketidakefektifan penyelesaian permasalahan yang seringkali mengorbankan masyarakat, terutama masyarakat dengan ekonomi kelas menengah ke bawah. Sistem ketidaksungguhan dari implementasi kebijakan semakin menambah panjang daftar kesinisian masyarakat terhadap produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh Barat dalam menanggulangi banjir tahunan.

Semakin tingginya krisis kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan di Aceh Barat tidak terlepas dari kebijakan publik yang diimplementasikan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Padahal, pegawai publik sebagai pelaksana kebijakan harus mampu memberikan pelayanan secara efektif dan efisien serta memberikan layanan prima terutama dalam hal sikap dan perilaku.

Kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat sebagai pengguna jasa dari birokrasi pemerintahan, kebijakan yang cenderung asal-asalan dan tidak sepenuh hati diimplementasikan menambah panjang daftar kritikan masyarakat terhadap model kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Aceh Barat, bahkan pemerintah

lebih cenderung mendominasi proses kebijakan dan mengkambinghitamkan sistem.

Tulisan oleh Zurayna Sari (2017) (Sari, 2017) yang berjudul Evaluasi Efektifitas Implementasi Program Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat ditemukan bahwa implementasi program penanggulangan bencana banjir tidak efektif dikarenakan tidak terlaksananya semua program dan kegiatan yang telah direncanakan yang disebabkan karena keterbatasan anggaran, minimnya kemampuan instansi pelaksana dan peralatan, serta kurangnya koordinasi dan sosialisasi antar instansi pelaksana. Hal ini kemudian menjadi dasar dari lemahnya peran pemerintah untuk menanggulangi persoalan banjir di Kabupaten Aceh Barat.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai model kebijakan yang tepat untuk mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Aceh Barat, sehingga factor penghambat yang telah ada dapat diminimalisir dengan pendekatan model kebijakan yang dianggap paling relevan dan sesuai untuk mengatasi persoalan tersebut. Masih banyaknya pilihan model dalam program pengentasan banjir menyebabkan ketidakpastian kebijakan yang harus dilaksanakan.

Kebijakan publik sebagai pondasi aturan hukum harus mampu menjawab berbagai macam tantangan dari masyarakat untuk membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu mengurus warga daerahnya. Kegagalan pemerintah dalam membangun kebijakan publik menyebabkan tanda tanya besar dari masyarakat terhadap pemahaman pemerintah mengenai makna dan substansi kebijakan itu sendiri, serta apakah kebijakan yang dibuat sudah melalui analisa yang mendalam sebelum diimplementasikan kepada publik.

Pembiaran terhadap inkonsistensi pemerintah dalam menyelenggarakan kebijakan publik akan semakin memperlebar

jurang antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang merata. Implementasi kebijakan yang benar harusnya dilaksanakan pada waktu yang tepat, karena apabila kebijakan yang benar sudah dibuat, namun waktu pelaksanaan tidak sesuai dengan keadaan maka kebijakan tersebut akan sia-sia, sehingga penting untuk mengkaji mengenai model-model kebijakan dalam penanggulangan banjir tahunan sehingga implementasi dan substansi dari kebijakan yang dibuat dapat dilaksanakan ada waktu dan tempat yang tepat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014). Sumber data utama berasal dari data sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka yaitu membaca dan memilih analisa-analisa kebijakan publik dan analisa lainnya yang berkaitan dengan kajian ini. Hasil analisis data disajikan secara deskriptif dengan menguraikan dan menggambarkan apa yang ada dengan permasalahan yang diteliti terkait kebijakan publik dan reformasi birokrasi di Indonesia. Lokasi penelitian ini di Kabupaten Aceh Barat dengan pertimbangan bahwa persoalan banjir yang ada di Aceh Barat masih terus berlanjut dan menjadi persoalan yang belum terselesaikan dari tahun ke tahun

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan publik memiliki beragam definisi dari para pakar yang menjadikan kebijakan publik sebagai kajiannya. Uraian panjang mengenai pemaknaan kebijakan publik menjadi penting sebagai dasar untuk membentuk kerangka pikir yang matang mengenai apa yang sebenarnya dimaksud oleh kebijakan publik.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-praktik tertentu (Nugroho, 2012). Dari definisi ini dapat dikatakan bahwa kebijakan merupakan agenda ataupun rencana yang dirancang oleh pemerintah dan berkaitan dengan program kerja pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, menyebarkan nilai tertentu dan mempraktikkan program tertentu berhubungan dengan masyarakat.

Kebijakan publik secara luas mengandung arti sebagai hubungan antara gagasan-gagasan, aksi-aksi dan hasil-hasil (Heywood, 2013). Pada tingkat gagasan berisi mengenai ide-ide dari program kerja yang sedang direncanakan oleh pengambil kebijakan, sehingga pada tingkat ini gagasan merupakan implementasi dari visi misi pengambil kebijakan yang dituangkan melalui agenda kerja. Pada tingkat aksi, eksekusi dari agenda yang telah direncanakan dilakukan secara aktual dan nyata oleh pengambil kebijakan. Sedangkan pada tingkat hasil akan tercermin pengaruh dari kebijakan yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan terhadap masyarakat luas.

Kebijakan publik dibuat oleh lembaga pemerintah yang turut melibatkan pegawainya, di mana program kerja pemerintah yang berkuasa akan direalisasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat luas. Kebijakan publik secara mendasar mengandung unsur-unsur politis yang berkaitan dengan pembuat kebijakan yaitu pemerintah, namun dalam praktiknya kebijakan publik harus mencerminkan strategi yang akan digunakan oleh pemerintah untuk mengatur dan mengontrol kehidupan masyarakat banyak, sehingga cerminan

keberhasilan dan kegagalan sebuah pemerintah terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dibuatnya.

Kebijakan publik merupakan tujuan yang dijalankan untuk maksud tertentu berupa tindakan-tindakan yang dibentuk oleh pemerintahan dan harus sesuai dengan keputusan perundang-undangan. Pembentukan kebijakan publik ini tidak hanya bersifat positif tetapi juga negatif, sesuai dengan hasil akhir dari implementasi kebijakan tersebut.

Hogwood dan Gunn secara terperinci mengartikan kebijakan sebagai sebuah merek bagi suatu bidang kegiatan tertentu berupa pernyataan mengenai tujuan umum dan keadaan tertentu yang dikehendaki oleh pemerintah maupun masyarakat sebagai usulan-usulan khusus yang direalisasikan sebagai keputusan pemerintah. Maka dari itu, kebijakan publik merupakan produk aturan formal sebagai sebuah program yang harus dijalankan oleh pemerintah, di mana output dari program tersebut diharapkan dapat memberikan hasil akhir yang memuaskan. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai teori ataupun model-model pengambilan kebijakan melalui proses-proses yang ada (Sunggono, 1994).

Kebijakan publik secara luas menjadi landasan bagi kajian-kajian mengenai program pemerintah, sehingga pemaknaan kebijakan publik sebagai teori atau model pengambilan kebijakan sangat lekat, dimulai dari proses hingga hasil akhir kebijakan yang diambil. Kajian mengenai kebijakan publik semakin kompleks karena tidak hanya mengkaji tentang bagaimana sebuah program harus dirumuskan dan ditetapkan, tetapi juga berbicara mengenai hambatan dan peluang yang ada dalam proses perumusan hingga implementasinya.

Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Agustino, 2008). Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya melihat keberhasilan kebijakan sebagai landasan dalam merumuskan program-program kerja pemerintah tetapi turut melibatkan hambatan ataupun tantangan sebagai evaluasi dalam perumusan kebijakan selanjutnya.

James E. Anderson menguraikan kebijakan publik sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu (Islamy, 2009). Kebijakan publik pada akhirnya adalah sebuah produk pemerintahan yang merupakan realisasi dari visi misi yang telah dibuat dan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan, meskipun tidak semua kebijakan publik dapat secara tepat menyelesaikan persoalan kenegaraan, hal ini dapat disebabkan karena perumusan kebijakan publik yang tidak sesuai dengan persoalan yang ada. Oleh karena itu penting untuk memahami berbagai macam model-model perumusan kebijakan publik.

Perumusan kebijakan publik sendiri terdiri dari rangkaian proses-proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme-mekanisme kebijakan publik yang dibentuk oleh pemerintah. Proses pembuatan kebijakan publik meliputi serangkaian aksi maupun peristiwa yang saling berkaitan di mulai dari hulu hingga berakhir di hilir artinya dalam proses pertama ini kesinambungan input-proses-output sebuah produk kebijakan harus dirancang secara matang dan berkorelasi, sedangkan proses kedua merupakan fokus

terpenting dari perumusan kebijakan itu sendiri, yaitu mengenai proses dari kebijakan itu.

TEORI-TEORI TENTANG PEMBUATAN KEBIJAKAN DALAM PENGULANGAN BANJIR DI ACEH BARAT

Berbagai macam produk kebijakan publik lahir dari keputusan-keputusan yang dibentuk oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Beragamnya produk kebijakan juga diwarnai dengan beragamnya metode atau teknik ataupun seni dalam membuat kebijakan itu sendiri, oleh karena itu penting untuk memahami berbagai macam model pembentukan kebijakan yang lazim digunakan. Adapun dalam kajian ini mengkaji 2 model pembuatan kebijakan publik yang disertai dengan contoh nyata produk kebijakan yang ada di Aceh Barat, yaitu model perilaku rasional dan model inkremental.

Model Pelaku Rasional (Teori Rasionalisme)

Model pembuatan kebijakan ini memberikan penekanan utama kepada rasionalitas manusia secara umum yang dibangun di atas landasan teori ekonomi yaitu utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan filsafat moral yang beranggapan bahwa individu-individu bertindak dan berbuat dengan cara memaksimalkan kesenangan dan meminimalisir kesusahan, di mana standar tersebut diukur dengan sudut pandang utilitas atau nilai guna, sehingga prinsip kebijakan ini berpedoman kepada nilai kebahagiaan yang maksimal bagi sebanyak mungkin masyarakat.

Proses perumusan kebijakan model ini dimulai dengan mencari tahu preferensi publik dan kecenderungannya, menemukan pilihan, menilai konsekuensi dari setiap pilihan, menilai resiko sosial yang dikorbankan, dan memilih alternatif yang paling tepat. Konsistensi proses perumusan kebijakan model ini cenderung banyak diminati oleh para pengambil kebijakan, karena dianggap sebagai model ideal yang mengedepankan keefisienan dan keefektifan sebuah kebijakan.

Model rasionalitas dalam kebijakan publik lebih mengutamakan gagasan maximum social gain, yaitu pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang dapat memberikan manfaat maksimal dan optimal bagi masyarakat luas. Titik berat model perumusan kebijakan ini selalu mempertimbangkan rasionalitas mengenai apa yang harus dikorbankan dan apa yang akan didapat, sehingga efisiensi dan keefektifan secara ekonomis sangat memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan model ini.

Model rasionalitas juga dikenal dengan sebutan "rasional komprehensif" dengan menggunakan faktor "kekomprehensifan" dalam unsur-unsur perumusan kebijakannya. Adapun unsurnya yaitu meliputi pembuatan keputusan dihadapkan kepada permasalahan yang berbeda-beda sehingga dapat diperbandingkan serta tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran terukur secara jelas sesuai dengan urutan prioritasnya dimulai dari alternatif pemecahan masalah, akibat yang ditimbulkan, perbandingan dari berbagai alternatif dan akibat yang ada, pemilihan alternatif dan akibat yang memiliki peluang paling besar untuk mencapai tujuan, nilai dan sasaran yang sudah ditentukan tadi (Jr, 2000).

Asumsi dasar model ini adalah adanya tujuan-tujuan yang jelas dan manusia harus mampu mencapai tujuan tersebut dengan cara rasional dan juga konsisten. Sehingga penekanan terhadap otoritas harus homogen sebagai cerminan yang menggambarkan bahwa masyarakat merasa yakin dengan keputusan yang dibuat, dan kepuasan dari masyarakat

merupakan tujuan utama dari pemikiran yang dibuat oleh para pengambil keputusan sebagai sebuah proses yang panjang dan mendalam demi kepentingan masyarakat luas.

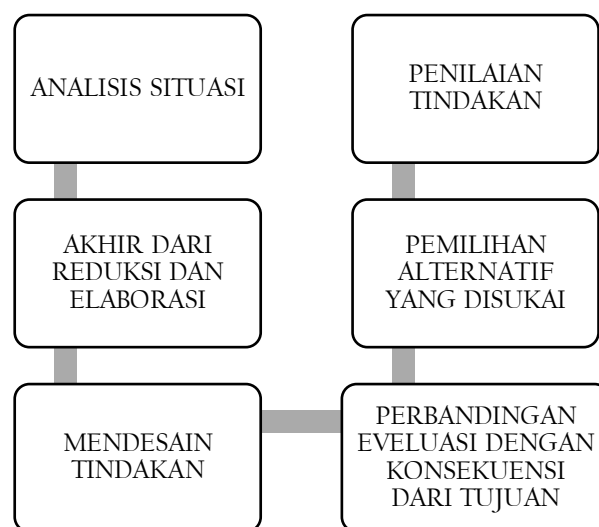


Diagram 1. Proses Pembuatan Kebijakan Model Rasionalitas

Sumber: Laster dan Steward, 2000: 94

Model rasionalitas memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi pelaksanaan kebijakan publik dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan model rasionalitas memberikan tujuan, nilai dan objektivitas yang menjadi panduan kepada pembuat kebijakan serta penjelasan yang lebih mendalam berdasarkan kepentingan kepada masyarakat. Namun begitu, teori rasionalitas memiliki beberapa kelemahan.

Tabel 1. Kelemahan Pembuat Kebijakan Model Rasionalitas

No.	Keterangan
1.	Rasionalitas antara satu pengambil kebijakan dengan pengambil kebijakan lainnya cenderung berbeda sehingga menghasilkan suatu yang terkadang tidak rasional. Dalam praktiknya, sering dijumpai penerapan konsep maximum social gain yang berbeda-beda diantara kelompok-kelompok kepentingan yang didasarkan kepada pandangan yang berbeda dari aspek ideologi, perbedaan Suku, Agama, dan Ras (SARA), dll.
2.	Patologi birokrasi yang cenderung mencari keuntungan pribadi dan mengenyampingkan kepentingan masyarakat, terutama dalam persoalan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap masyarakat cenderung "sakit". Selain itu, pegawai negeri dalam sebuah institusi juga merasakan dampak dari rendahnya insentif yang mereka dapatkan sehingga mempengaruhi kinerja mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat bahkan tidak sedikit yang berujung kepada praktik korupsi.
3.	Model perumusan kebijakan ini lebih mudah diterapkan kepada individu-individu daripada kelompok-kelompok organisasi besar yang cenderung memiliki tingkat pertentangan tujuan, nilai dan sasaran yang besar. Hanya organisasi yang memiliki kepemimpinan kuat dan solid saja dapat mengamalkan model ini, sehingga peluang terjadinya rasionalitas pada tingkat-tingkat tertentu masih sangat jauh dari harapan untuk berhasil.
4.	Dalam praktik perumusan kebijakan model ini cenderung memiliki kelemahan dari segi akurasi

informasi dan berbagai ragam alternatif dan akibat seringkali tidak sebanding untuk diperbandingkan. Oleh karena itu, seringkali ketidaktepatan dalam membentuk alternatif dan akibat menyebabkan ketidaksesuaian antara permasalahan yang akan diselesaikan dengan upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

5. Peningkaran terhadap peran dari persepsi yang menyatakan sejauh mana aksi-aksi dibentuk oleh keyakinan dan asumsi tentang realitas, daripada oleh realitas itu sendiri (Andrew Heywood, 2013). Peningkaran terhadap pedoman dan landasan filosofi dari para pengambil kebijakan semakin termarjinalkan.

Sumber: disusun oleh penulis

Contoh perumusan kebijakan dari model rasionalitas mengenai penanggulangan bencana banjir di Aceh Barat adalah sampai saat ini belum ada, karena berbagai metode penanggulangan bencana masih mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Seperti penggunaan kebijakan nasional, RPJMN, dan rencana strategis nasional.

Model Inkremental

Model kebijakan publik ini merupakan alternatif dari kelemahan-kelemahan model rasionalitas. David Byarbrook dan Charles Lindblom mengkaji mengenai model ini sebagai salah satu alternatif pembuatan kebijakan publik yang cenderung dibuat dalam keadaan pragmatis, di mana terdapat keterbatasan waktu, informasi maupun dana.

Model kebijakan inkremental sangat sesuai diaplikasikan kepada masyarakat dengan corak pluralis seperti di Indonesia. Keadaan masyarakat yang pluralis dengan keberagaman harapan menjadikan kebijakan baru yang cenderung dapat memuaskan semua pihak dengan sangat mustahil, karena akan menghabiskan banyak waktu dan biaya, sehingga keputusan untuk melanjutkan kembali kebijakan yang sudah ada dianggap sebagai alternatif terbaik.

Tujuan pembuatan kebijakan publik inkremental hanya mengkaji ulang kebijakan yang sudah ada sebelumnya sehingga tujuan utama yang ingin dicapai untuk kepentingan masyarakat luas sudah diidentifikasi dengan tepat. Model ini menunjukkan bahwa dorongan dari sistem nilai dan tanggung jawab mendasar terhadap kepentingan yang beragam dapat ditampung dan dibentuk demi kepentingan bersama.

Kelebihan model inkremental terdapat pada upaya untuk menganalisa secara sederhana mengenai aspek-aspek politik dengan tepat berlandaskan kepada sistem nilai yang dianggap mampu untuk menangani konflik dan menjaga kestabilan masyarakat dalam negara. Meskipun hanya mengadakan perbaikan pada beberapa aspek kebijakan saja, model inkremental berupaya untuk terus mengadakan perbaikan secara bertahap mengenai kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya untuk mengimbangi serta mencari kesesuaian kebijakan yang lebih mapan.

Kepraktisan model inkremental ini memberikan keuntungan bagi para pengambil dan pembuat kebijakan berupa fleksibilitas kebijakan terhadap keadaan tertentu yang secara urgensi membutuhkan terbentuknya sebuah kebijakan. Model ini juga turut mendorong kepekaan penguasa terhadap problem-problem tertentu yang sedang dihadapi oleh masyarakat melalui prosedur konsultasi dan kompromi atas kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya, sehingga bagi banyak pengambil kebijakan memandang model inkremental memiliki karakter anti-utopia.

Dinamika dunia yang cenderung mengalami perubahan dengan cepat menjadikan model pembuatan kebijakan model inkremental ini dianggap memadai dengan kondisi tersebut. Penggunaan kembali kebijakan-kebijakan lama dalam model ini bukan hanya didasarkan pada kurangnya sumber daya baik materil maupun non materil, tetapi keberhasilan pengamalan kebijakan lama menjadi daya tarik sendiri bagi pemerintah untuk mengulang kembali keberhasilan tersebut melalui penggunaan kembali kebijakan yang sudah ada, inilah makna dari model inkremental sebagai sebuah pembuatan kebijakan.

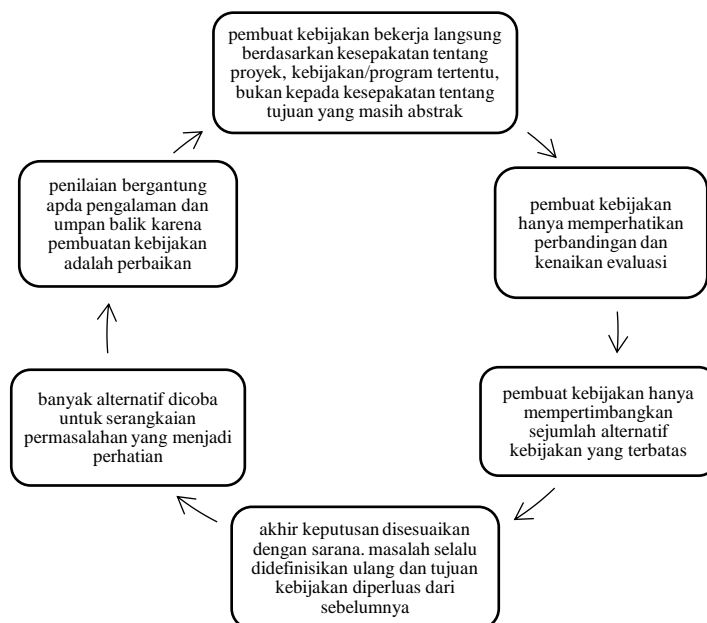


Diagram 2. Proses Pembuatan Kebijakan Model Inkremental

Sumber: Lester dan Steward, 2000: 94

Model pembuatan kebijakan inkremental pada akhirnya hanya menekankan kepada tujuan berdasar pengalaman dan umpan balik saja. Hal ini sesuai dengan pandangan Linblom bahwa penyelesaian permasalahan publik (dilanjutkan) lebih sedikit menekankan kepada aspirasi menuju keadaan amsa depan yang terdefinisi dengan baik dibandingkan dengan penyakit sosial yang teridentifikasi yang tampaknya membutuhkan perbaikan. Singkatnya, tujuan akhir tidak menjadi perhatian besar (Placeholder) (Nugroho, 2012).

Penghematan waktu dan biaya dalam pembuatan kebijakan model inkremental ini tidak selalu memberikan hasil positif terhadap kepuasan masyarakat mengenai model kebijakan ini. Kelemahan-kelemahan model inkremental ini cukup memberikan pengaruh yang besar bagi keefesienan implementasi kebijakan model ini.

Tabel 2. Kelemahan Pembuatan Kebijakan Model Inkremental

No.	Keterangan
1.	Ketidakmampuan model inkremental dalam meramalkan akibat-akibat dari berbagai alternatif yang memadai dalam sebuah pembuatan kebijakan. Kurang memadainya dana dan juga proses pembuatan kebijakan menjadikan hasil kebijakan model ini cenderung mengabaikan akibat-akibat yang terkadang memiliki dampak yang cukup substansial bagi pelaksanaan keputusan kebijakan, sehingga dalam hal ini pemerintah terkesan apa adanya untuk membuat keputusan tanpa pemikiran yang matang.
2.	pembuatan kebijakan model inkremental bukan bersifat <i>value maximizers</i> tetapi cenderung sebagai <i>satisficers</i> yang bertindak untuk memuaskan tuntutan kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kelemahan ini menyebabkan pemerintah tidak memperdulikan keberadaan nilai-nilai sosial dalam masyarakat yang majemuk namun arah pembuatan kebijakan model ini lebih memuat tujuan khusus kepada segelintir kepentingan.
3.	kurangnya waktu, pengetahuan dan juga pengalaman dari kalangan pembuat kebijakan, bahkan pembuat kebijakan terkesan tidak cerdas dalam membuat kebijakan yang disebabkan minimnya biaya untuk mengumpulkan informasi, sehingga informasi pendukung untuk melengkapi data-data dalam pembuatan keputusan terbatas.
4.	anggapan bahwa model pembuatan kebijakan ini bersifat konservatif, dimana inovasi dan dukungan buta terhadap kebijakan yang cenderung monoton menjadi kewajiban bagi pemerintah. Pembuat kebijakan hanya memikirkan permasalahan-permasalahan yang terjadi saat itu dan berupaya cepat untuk membuat keputusan tanpa adanya usaha untuk mengembangkan visioner jangka panjang, sehingga model kebijakan ini tidak banyak menjelaskan tentang keputusan-keputusan pemerintah yang radikal, bahkan revolusioner.

Sumber: Riant Nugroho, 2012: 263

Contoh dari pembuatan kebijakan model inkremental di Aceh Barat adalah dengan adanya kebijakan penanggulangan banjir hanya pada tingkat parsial saja atau tidak melihat akar permasalahan secara kompleks terhadap penyebab utama terjadinya banjir yang terjadi di DAS (Daerah Aliran Sungai).

Selain itu kebijakan terhadap penanggulangan banjir juga tidak disertai dengan kebijakan untuk membuat tanggul permanen, tanggul yang ada hanya dibuat sederhana dan untuk keperluan yang mendesak saja.

DAMPAK MODEL KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BANJIR TAHUNAN TERHADAP MASYARAKAT DI ACEH BARAT

Banjir yang merupakan peristiwa terendahnya suatu daerah karena volume air yang meningkat dapat diakibatkan oleh beberapa faktor seperti penyumbatan aliran sungai, curah hujan tinggi, penyalahgunaan lahan sekitar sungai, dan penggundulan hutan. Dampak banjir sangat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat sekitarnya seperti timbulnya korban jiwa, kerusakan lahan pertanian, gagal panen, hancurnya sarana dan prasarana, serta menimbulkan dampak yang krusial terhadap kesehatan masyarakat.

Dominannya model kebijakan inkremental dalam penanggulangan banjir tahunan yang terjadi disebagian besar kabupaten Aceh Barat seperti wilayah Woyla Barat, Woyla Timur, Woyla, Samatiga, Kaway XVI, Meurebo dan Johan Pahlawan mempengaruhi aktifitas sosial masyarakat wilayah tersebut. Bencana banjir tersebut menghentikan kegiatan dan akses-akses masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sehingga berpengaruh kepada kehidupan sosial masyarakat.

Ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan banjir tahunan yang kerap terjadi kepada pemerintah Aceh Barat harusnya dapat memberikan dorongan ataupun respon yang positif melalui pembentukan kebijakan yang lebih rasional terhadap penanggulangan banjir, bukan hanya sebatas membentuk kebijakan saat kondisi dan keadaan genting.

Persoalan banjir tahunan harus menjadi agenda utama pemerintah kabupaten Aceh Barat, sehingga dapat meminimalisir dampak dari banjir tersebut terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti bekerja dan bersekolah. Model kebijakan rasional seharusnya menjadi pilihan utama dengan memulainya dari sekarang, meskipun akan memakan waktu lama, namun diharapkan dengan model kebijakan ini akar penyebab utama terjadinya banjir yaitu ketidakmampuan luas sungai yang ada di wilayah Aceh Barat menampung debit hujan terutama pada musim hujan dapat diatasi.

Kesan pembiaran terhadap banjir tahunan yang terjadi di Aceh Barat dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perilaku sosial masyarakat yang selalu hidup dalam ancaman banjir setiap tahunnya akan mempengaruhi tindakan sosial masyarakat itu sendiri, seperti pengabaian terhadap lingkungan sekitar bahkan cenderung tidak peduli terhadap alam dengan bebas akan melanggar aturan hukum seperti menambang pasir sungai tanpa mengindahkan aturan yang ada sehingga peluang terjadinya banjir tahunan bukan semakin minim tetapi semakin lebar.

Kajian risiko bencana Aceh 2016-2020 yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh merilis bahwa banjir merupakan potensi bencana alam yang utama sering terjadi di Aceh, termasuk di wilayah Aceh Barat.

Tabel 3. Sejarah Kejadian Bencana Banjir Provinsi Aceh 1815-2015

Kejadian	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka-luka	Hilang	Mengungsi	Rumah rusak berat	Rumah rusak ringan	Kerusakan lahan (HA)
Banjir	215	142	545	65	659.499	3.594	8.741	80.219
Banjir bandang	13	60	38	32	99.724	17.740	23.494	180
Gelombang ekstrim dan abrasi	21	2	2	-	567	144	30	-

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh 2015

Bencana banjir di Provinsi Aceh merupakan persoalan yang terus menerus muncul di setiap tahun bukan hanya merusak sarana dan prasarana yang ada tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu penanggulangan bencana banjir terutama di Aceh Barat yang didominasi oleh sistem DAS yang belum efektif perlu segera ditangani dengan dirumuskan sebuah kebijakan rasional yang mampu memberi alternatif pemecahan masalah yang kompleks tersebut. Selain daripada itu, pemerintah Aceh Barat harus mampu memetakan kondisi keselamatan bagi warga Aceh Barat yang terdampak banjir, dikarenakan jelas bahwasannya potensi banjir menempati posisi nomor satu sebagai bencana yang berpotensi di provinsi Aceh.

Tabel 4. Potensi Bencana Provinsi Aceh

No.	Jenis Bencana
1.	Banjir
2.	Banjir Bandang
3.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi
4.	Gempa Bumi
5.	Tsunami

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh 2015

Potensi banjir disebabkan wilayah disesuaikan dengan parameter bahaya sebagai tolak ukur terjadinya banjir yaitu daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai dan curah hujan. Sedangkan wilayah Aceh Barat sendiri yang paling sering terkena banjir adalah wilayah-wilayah yang terdapat disepanjang aliran sungai, akibat tidak adanya mekanisme kebijakan yang sesuai dengan penyelesaian permasalahan banjir. Oleh karena itu, Aceh Barat menduduki peringkat sebagai daerah yang memiliki potensi bahaya tinggi terhadap banjir.

Tabel 5. Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Aceh

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1.	Simeulue	45.141	Tinggi
2.	Aceh Singkil	126.056	Tinggi
3.	Aceh Selatan	140.325	Tinggi
4.	Aceh Tenggara	22.879	Tinggi
5.	Aceh Timur	188.647	Tinggi
6.	Aceh Tengah	7.930	Tinggi
7.	Aceh Barat	113.546	Tinggi
8.	Aceh Besar	72.434	Tinggi
9.	Pidie	55.721	Tinggi
10.	Bireuen	51.643	Tinggi
11.	Aceh Utara	152.506	Tinggi
12.	Aceh Barat Daya	46.330	Tinggi
13.	Gayo Lues	3.909	Sedang
14.	Aceh Tamiang	108.681	Tinggi
15.	Nagan Raya	161.089	Tinggi
16.	Aceh Jaya	76.251	Tinggi

17.	Bener Meriah	15.279	Sedang
18.	Pidie Jaya	21.496	Tinggi
19.	Banda Aceh	5.952	Tinggi
20.	Sabang	604	Rendah
21.	Langsa	16.222	Tinggi
22.	Lhokseumawe	9.805	Tinggi
23.	Subulussalam	58.245	Tinggi

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Aceh 2015.

Persoalan banjir, bukan hanya tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat saja, namun kepedulian masyarakat untuk mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga diperlukan sehingga mampu mendorong tanggungjawab sosial pemerintah daerah kepada masyarakat daerahnya dengan merumuskan kebijakan penanggulangan bencana banjir yang lebih efektif dan efisien

KESIMPULAN

Model perumusan kebijakan dalam penanggulangan bencana banjir harus berupaya melihat akar penyebab hingga ke solusi yang tepat, oleh karena itu diperlukan analisa dan kajian yang mendalam menggunakan model perumusan kebijakan rasionalitas untuk menyelesaikan akar permasalahan yang bersesuaian dengan alternatif yang akan diterapkan. Untuk itu, pemerintah daerah bersama masyarakat harus mampu bekerja sama dan membangun kepedulian bagi terciptanya kondisi lingkungan yang mapan guna mendorong kelestarian alam dan keberlanjutan kehidupan manusia.

Peran pemerintah serta keikutsertaan masyarakat untuk sama-sama menjaga lingkungan dan berperan aktif dalam merumuskan kebijakan yang tepat perlu digalakan demi terciptanya keseimbangan kehidupan antara alam dan manusia. Oleh karena itu, masyarakat sebagai makhluk sosial harus dibekali dengan pemahaman bahwa hidup berasal dari alam dan akan kembali kepada alam, agar terbangun kepedulian untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menjaga lingkungan hidupnya

REFERENSI

- Sari, Z. (2017). *Evaluasi Efektifitas Implementasi Program Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Aceh Barat. Prosiding Temu Ilmiah IPLBI (hal. 1-4)*. Lhokseumawe: Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Malikussaleh.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Heywood, A. (2013). *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. 2009: Bumi Aksara.
- Jr, J. P. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth. (t.thn.).
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Kajian Risiko Bencana Aceh 2016-2020*. 2015. Aceh: BPBA.